

**PELAKSANAAN PENAPISAN HEPATITIS B  
PADA IBU HAMILDALAM PEMENUHAN HAK PASIEN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh  
Aldila Geri Istantina  
NIM: 15.C2.0042

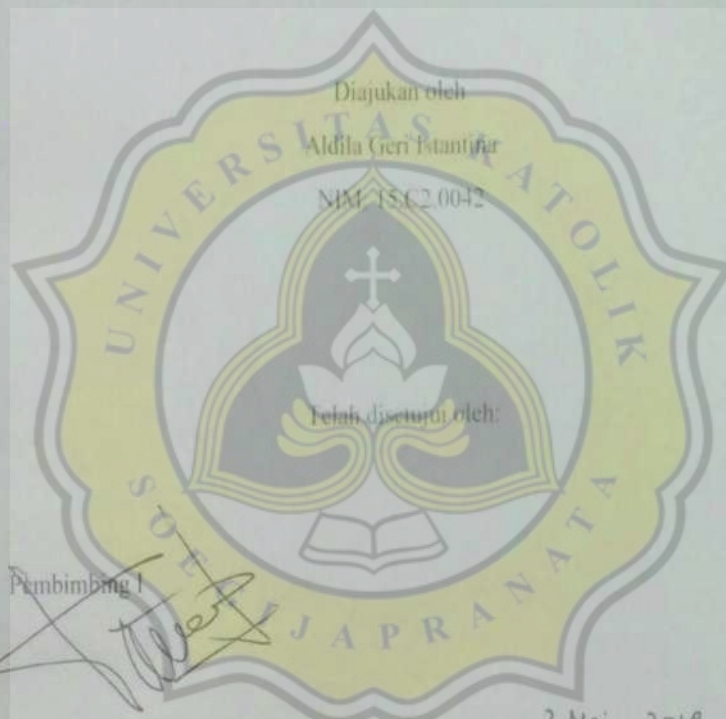
Kepada

**FAKULTAS PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis

PELAKSANAAN PENAPISAN HEPATITIS B  
DALAM PEMENUHAN HAK PASIEN



Diajukan oleh  
Aldila Geri Istantina  
NIM. 15.C2.0042

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Prof. Dr. Agnes Widanti., SH., CN

Tanggal 3 Mei 2018

Pembimbing II

dr. Hartanto, M. Med., Sc

Tanggal 3/5/2018.

PENGESAHAN

Testis di susun oleh :

Nama: ALDHA GERI Istantina

NIM: 1502.0042

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Jumat, 27 April 2018

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji

1. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH, S.H.
2. dr. Hartanto, M.Med., Sc.
3. dr. I Edward Kurnia SL, MM, MH Kes., Sp. PK., Msi. Med.

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Jumat, 27 April 2018

  
(Dr. Endang Wahyari Y, SB., MH)  
Ketua Program Studi  
Magister Hukum

  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

## **PRAKATA**

Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan penyelenggaraan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Pelaksanaan Penapisan Hepatitis B Pada Ibu Hamil Dalam Upaya Pemenuhan Hak Pasien.” Dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo. Hak pasien atas penapisan hepatitis B pada ibu hamil telah terpenuhi karena bukan merupakan kewajiban dan hanya bersifat ditawarkan seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis. Pemerintah diharapkan memfasilitasi penapisan hepatitis B dan menjadikan penapisan hepatitis B menjadi wajib dan tanggung biayanya oleh pemerintah karena Indonesia merupakan negara dengan hepatitis tertinggi nomor tiga di dunia.

Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studian meraih jenjang Sarjana S-2 Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis merasa bersyukur karena dalam menyelesaikan Tesis ini mendapat banyak dukungan, bimbingan, bantuan serta masukan-masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas bantuan, dukungan, dan bimbingan yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Frederik Ridwan Sanjaya, SE.,S.Kom.,MS.,IEC., sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Prof.Dr. Ing LMF, selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH.CN, sebagai dosen pembimbing satu yang telah dengan sabar dan setia memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan dorongan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. dr.Hartanto, M.Med., Sc sebagai dosen pembimbing kedua yang sangat sabar dan setia memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan dorongan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. dr. I. Edward Kurnia SL, MM., MH.Kes., Sp.PK., Msi.Med selaku dosen penguji yang banyak memberikan masukan dan arahan dalam tesis ini.
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, yang dengan tulus dan sabar memberikan pengajaran dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan dalam segala aspek, khususnya aspek hukum kesehatan.

8. Para staf sekretariat Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, yang dengan sabar memberikan bantuan administrasi dalam kegiatan belajar mengajar.
9. Papa saya Sugeng, S.E. dan mama saya S. Riyani Utami, S.H. yang telah mendukung selama proses saya menuntut ilmu di Magister Hukum Kesehatan.
10. Suami saya Muhammad Novriandi, S.H. yang telah memberi dukungan bagi penulisan tesis ini dengan cinta dan kasih sayang.
11. Papa Mertua H. Zulhermis, S.H. dan mama mertua Hj.Marta Novyani, S.H. yang telah memberi dukungan dan doa agar tesis ini selesai dengan lancar.
12. Sahabat-sahabat serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendukung penulis dengan caranya masing-masing.

Akhir kata, kesempurnaan hanya milik Tuhan, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun agar dapat semakin baik dan sempurna. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan informasi, bahan pembandingan dan masukan bagi peneliti lain yang meneliti masalah sejenis, serta menambah literatur/referensi ilmu pengetahuan, dan khususnya bidang hukum kesehatan.

Semarang, April 2018

Penulis

Aldila Geri Istantina

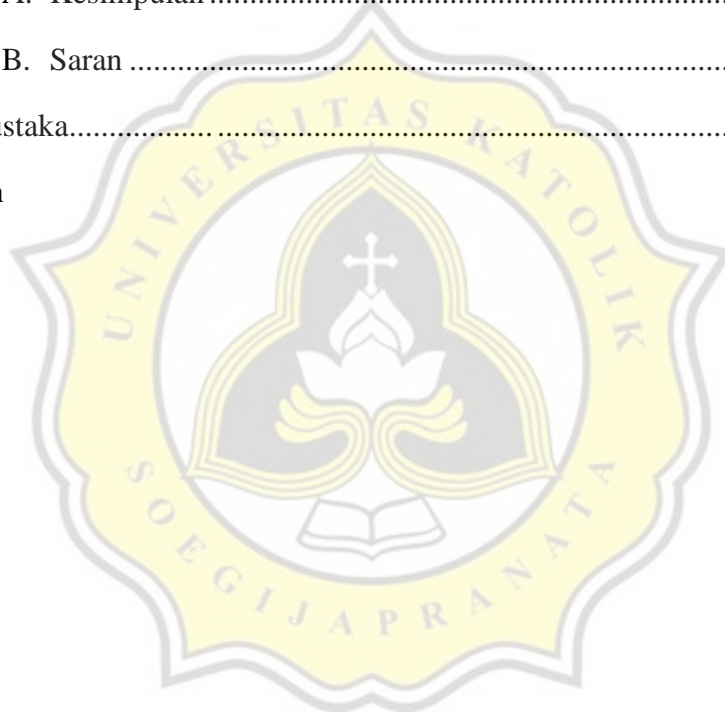
## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Prakata.....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Gambar .....	x
Pernyataan Keaslian Tesis.....	xi
Abstrak .....	xii
Abstract .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	5
1. Metode Pendekatan .....	5
2. Spesifikasi Penelitian.....	6
3. Jenis Data .....	6
4. Metode Pengumpulan Data .....	8
5. Metode Analisis Data .....	10
F. Rencana Penyajian Tesis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Konsep.....	13
B. Kerangka Teori .....	14

C. Teori Hukum.....	15
1. Hukum dan Fungsi Hukum.....	15
2. Filsafat Hukum dan Cita Hukum .....	16
3. Asas Hukum.....	18
4. Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	19
5. Hak dan Kewajiban.....	20
D. Konsep Pelaksanaan Penapisan Hepatitis B Pada Ibu Hamil.....	22
1. Rumah Sakit Sebagai Penyedia Layanan Kesehatan .....	22
2. Perlindungan Hak Pasien Memperoleh Layanan Kesehatan .	26
3. Hak Layanan Kesehatan Khusus Pada Ibu Hamil .....	29
2. Promosi Kesehatan Tentang Penapisan Hepatitis B .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Hasil Penelitian .....	34
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
2. Hasil Wawancara .....	35
a. Hasil Wawancara dengan Responden yang Merupakan Pasien Bangsal Melati .....	35
b. Hasil Wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo .....	40
c. Hasil Wawancara dengan Komite Medis.....	42
d. Hasil Wawancara dengan Komite Keperawatan .....	44
e. Hasil Wawancara dengan Kepala Bangsal Melati .....	45
3. Hasil Pengamatan.....	46
B. Pembahasan .....	47
1. Regulasi Penapisan Hepatitis B Pada Ibu Hamil di Indonesia .	47



2. Implementasi Pelaksanaan Penapisan Hepatitis B pada ibu hamil dalam Pemenuhan Hak Pasien.....	53
3. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Penapisan Hepatitis B Pada Ibu Hamil.....	64
a. Faktor Penghambat .....	64
b. Faktor Pendukung .....	65
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	71
Daftar Pustaka.....	74
Lampiran	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep.....	13
Gambar 2. Kerangka Teori.....	14



## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Nomor : 0047/SK.Rek/X/2013  
Tanggal : 07 Oktober 2013  
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI TUGAS AKHIR DAN  
TESIS

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR / TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam ~~skripsi / tugas akhir / tesis~~\*) yang berjudul:

#### **PELAKSANAAN PENAPISAN HEPATITIS B PADA IBU HAMIL DALAM PEMENUHAN HAK PASIEN**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya jga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa ~~skripsi / tugas akhir / tesis~~ \*) ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 27 April 2018



(Aldila Geri Istantina)

## Abstraksi

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan (*the right to health care*). Hak atas pelayanan kesehatan khusus melalui pemeriksaan antenatal pada ibu hamil tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pemeriksaan antenatal selama kehamilan dengan melakukan deteksi dini terhadap penyakit menular dari ibu kepada bayinya seperti tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014. Hepatitis B merupakan penyakit menular dari ibu kepada bayinya (*mother-to-child-transmission*). Rumah Sakit Umum Darmayu Ponorogo hanya mewajibkan pemeriksaan terhadap ibu yang akan menjalani *sectio caesarea*.

Pelaksanaan regulasi di Indonesia terkait hepatitis B tidak lepas dari nilai hukum yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanganan Hepatitis dijelaskan oleh bahwa pemeriksaan hepatitis pada ibu hamil hanya bersifat di sarankan bukan mewajibkan, sehingga Rumah Sakit Umum Darmayu tidak melakukan pelanggaran jika hanya mewajibkan penapisan pada pasien *sectio caesarea* tersebut menyebabkan asas keadilan tidak tercapai. RSUD Darmayu menarik biaya penapisan kepada pasien umum maupun BPJS. Rumah sakit semestinya tidak menarik biaya pada pasien BPJS yang dirawat sesuai kelasnya jika melakukan penapisan hepatitis B hal tersebut merupakan *fraud*.

Faktor penghambat pelaksanaan penapisan hepatitis B adalah biaya penapisan yang dibayarkan mandiri oleh pasien, kesadaran pasien dan tenaga kesehatan tentang hepatitis B masih kurang, sistem pelaporan hepatitis B yang belum baik dan peran dinas kesehatan Ponorogo yang dirasa masih lemah terkait penanganan hepatitis B di daerahnya. Faktor pendukung pelaksanaan penapisan hepatitis B adalah kebijakan nasional terkait penapisan hepatitis B yang masih bersifat disarankan, meski masih terdapat disharmonisasi dengan peraturan terkait hak reproduksi khusus dan pemeriksaan antenatal, kebijakan RSUD Darmayu tentang mewajibkan penapisan hepatitis B pada pasien *sectio caesarea*, dan komitmen tenaga kesehatan di RSUD Darmayu untuk meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi terkait dengan virus hepatitis B.

Kata kunci : Hak Pasien, Penapisan, Hepatitis B, Ibu Hamil

## Abstract

Health was one of human rights and this meant that every person had the right to health care for his or her health sake. The rights to health care written in Article 49 paragraph (2) of the Act Nr. 39 of 1999 on Human Rights were about rights of special health service to pregnant mothers that were to get antenatal care. Antenatal care during pregnancy included early detection of infectious diseases from mothers to their babies as set out in Article 12 of the Minister of Health's Regulation Nr. 97 of 2014 on Pre-Pregnancy Health Services, Pregnancy, Delivery and Postpartum Period, Contraception Service, and Sexual Health Service. Hepatitis B was one of mother-to-baby-transmission diseases. The screening was only required to mothers who would have *sectio caesareain* Darmayu general hospital.

The legislation implementation related with hepatitis B could not be separated from legal values, namely expediency, justice and legal certainty. Article 11 of the Minister of Health's Regulation Nr. 53 of 2015 on Hepatitis Handling explained that the screening hepatitis for pregnant woman was only a recommendation not an obligation. Therefore, Darmayu General Hospital did not violate the regulation if it required a screening only to patients of *sectio caesarea*, and not implementation legal value of justice. Darmayu general hospital do fraud and all patient must pay screening of hepatitis B. This made some patients refuse to have the screening.

The awareness of the public, health personnel and government remained low so they had not been aware of Hepatitis B dangers. The hospital was lack of Hepatitis B reporting and there was no medical record of patient having Hepatitis. One of the supporting factors of Hepatitis B screening implementation at Darmayu General Hospital was the standard operating procedure requiring patients of *sectio caesarea* to perform the screening. The hospital's commitment to provide information and education to all patients at midwifery and womb ward had made the patients aware of the importance of hepatitis B screening.

**Keywords:** patient's rights, screening, hepatitis B, pregnant woman